

KABINET BURHANNUDIN HARAHAP DAN PEMILU 1955: STUDI TRANSISI KEKUASAAN SECARA DEMOKRATIS

Tubagus Muhammad Damar Ilham¹, Eko Ribawati²

¹² Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari 2026

Revised Januari 2026

Accepted Januari 2026

Available Januari 2026

¹tubagusdamar123@gmail.com.

²eko.ribawati@untirta.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Transisi kekuasaan merupakan salah satu barometer krusial dalam mengukur kematangan politik dan keberlanjutan sebuah negara demokrasi. Setelah pengakuan kedaulatan penuh pada tahun 1949, Indonesia memilih sistem parlementer, secara teoretis menjamin kontrol rakyat melalui parlemen. Pada 12 Agustus 1955, di tengah suasana politik yang sangat memanas, Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi dipercaya membentuk kabinet. Penelitian ini membahas peran Kabinet Burhanuddin Harahap dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan Pemilu 1955. tantangan dan hambatan yang dihadapi Kabinet Burhanuddin Harahap dalam melaksanakan agenda Pemilu 1955. Dan sejauh mana Pemilu 1955 mencerminkan keberhasilan transisi kekuasaan secara demokratis di Indonesia pada masa itu. Penelitian ini menggunakan metode historis menurut Kuntowidjoyo. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil melaksanakan Pemilu 1955, yang secara luas diakui sebagai Pemilu Indonesia yang paling demokratis sepanjang sejarah bangsa. Pelaksanaannya mencatat

tingkat partisipasi pemilih yang sangat tinggi, mencapai 91,54% dari total pemilih terdaftar. Keberhasilan Kabinet Burhanuddin Harahap dalam mengembalikan stabilitas politik, menyelesaikan masalah dalam tubuh Angkatan Darat (mengangkat A.H. Nasution sebagai KSAD), dan gencar memberantas korupsi berfungsi sebagai prasyarat penting bagi penyelenggaraan

Kata Kunci: Demokrasi Liberal, Kabinet Burhanuddin Harahap, Pemilu 1955, Transisi

ABSTRACT

The transition of power is one of the crucial barometers in measuring the political maturity and sustainability of a democratic country. After gaining full sovereignty in 1949, Indonesia chose a parliamentary system, which theoretically guarantees public control through parliament. On 12 August 1955, amid a highly heated political atmosphere, Burhanuddin Harahap from the Masyumi Party was entrusted with forming a cabinet. This study discusses the role of Burhanuddin Harahap's Cabinet in preparing and organising the 1955 elections, as well as the challenges and obstacles faced by Burhanuddin Harahap's Cabinet in implementing the 1955 election agenda. It also examines the extent to which the 1955 elections reflected the success of the democratic transition of power in Indonesia at that time. This study uses Kuntowidjoyo's historical method. The findings show that the Burhanuddin Harahap Cabinet successfully held the 1955 elections, which are widely recognised as the most democratic elections in Indonesia's history. The elections recorded a very high voter turnout, reaching 91.54% of the total registered voters. The Burhanuddin Harahap Cabinet's success in restoring political stability, resolving issues within the

*Corresponding author

E-mail addresses: tubagusdamar123@gmail.com

Army (appointing A.H. Nasution as Army Chief of Staff), and aggressively eradicating corruption served as important prerequisites for the implementation of the elections.

Keywords *Liberal Democracy, Burhanuddin Harahap Cabinet, 1955 Elections, Transition*

1. PENDAHULUAN

Setelah pengakuan kedaulatan penuh pada tahun 1949, Indonesia memilih sistem parlementer, yang secara teoretis menjamin kontrol rakyat melalui parlemen. Namun, kenyataannya adalah fragmentasi partai yang ekstrem dan ketiadaan mayoritas tunggal. Akibatnya, kabinet-kabinet yang terbentuk seringkali rapuh, berusia pendek (rata-rata hanya delapan bulan), dan terus-menerus diguncang mosi tidak percaya. Instabilitas ini mencapai puncaknya menjelang pertengahan 1955.

Kabinet sebelumnya, Kabinet Ali Sastroamidjojo I (PNI-NU), jatuh pada Juli 1955 setelah perselisihan internal antara PNI dan NU, serta tekanan dari militer pasca-peristiwa "27 Juni" (mengenai suksesi pucuk pimpinan Angkatan Darat). Krisis ini menuntut sebuah pemerintahan baru yang memiliki mandat kuat dan, yang paling utama, mampu menyelenggarakan hajatan politik terbesar yang telah lama tertunda: Pemilihan Umum pertama sejak Indonesia merdeka.

Pada 12 Agustus 1955, di tengah suasana politik yang sangat memanas, Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi dipercaya membentuk kabinet. Kabinet Burhanuddin Harahap mengambil alih kepemimpinan dengan agenda tunggal yang sangat jelas: mengembalikan moral pemerintahan, menyelesaikan kasus-kasus korupsi, dan menjamin pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Mandat yang diemban oleh kabinet ini, yang terdiri dari koalisi "anti-Ali" yang cukup luas, secara eksplisit berorientasi pada penyelesaian krisis politik melalui jalan demokrasi.

Penelitian ini membahas peran Kabinet Burhanuddin Harahap dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan Pemilu 1955?. Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi Kabinet Burhanuddin Harahap dalam melaksanakan agenda Pemilu 1955?. Dan sejauh mana Pemilu 1955 mencerminkan keberhasilan transisi kekuasaan secara demokratis di Indonesia pada masa itu?

TINJAUAN PUSTAKA

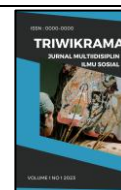
Politik

Politik adalah disiplin ilmu yang menganalisis konsep, prinsip, serta mekanisme kekuasaan dan cara kekuasaan tersebut dijalankan, dipertahankan, dan dinegosiasikan dalam masyarakat. Teori politik mencakup analisis tentang negara, pemerintahan, legitimasi, demokrasi, partai politik, dan interaksi antara masyarakat dan penguasa. Dalam konteks demokrasi kontemporer, teori politik membahas tidak hanya jenis kekuasaan, tetapi juga cara kekuasaan mendapatkan legitimasi melalui sistem konstitusi, pemilihan umum, representasi, dan partisipasi politik. Oleh karena itu, teori politik memiliki peran krusial dalam menguraikan dinamika kehidupan politik, termasuk interaksi antara negara, institusi politik, dan Masyarakat. Dua teori yang relevan dalam konteks penelitian politik demokratis di Indonesia adalah: (1) Teori Demokrasi Konstitusional, dan (2) Teori Partai Politik. Kedua teori ini menjelaskan bagaimana kekuasaan diperoleh dan dipertahankan melalui mekanisme institusional dalam sistem demokrasi.

Teori Demokrasi Konstitusional

Teori demokrasi konstitusional menurut Herbert Feith adalah yaitu sistem politik yang dijalankan melalui mekanisme konstitusi, pemisahan kekuasaan, lembaga perwakilan rakyat, dan kompetisi antarpolisi dalam kerangka rule of law. Menurut Feith, karakter utama dari demokrasi konstitusional adalah:

- Supremasi Konstitusi, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan norma hukum yang mengatur struktur kekuasaan secara formal.
- Pemisahan Kekuasaan, fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki batas serta mekanisme kontrol.
- Parliamentary Accountability, pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen melalui mekanisme suara mayoritas, koalisi, dan mosi tidak percaya.



- Kompetisi Politik Terbuka, pemilu menjadi sarana legitimasi kekuasaan melalui mekanisme yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- Jaminan Kebebasan Sipil dan Politik, demokrasi konstitusional ditandai dengan adanya kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan kebebasan mengemukakan pendapat.

Teori Partai Politik

Dalam bukunya Miriam Budiardjo yang berjudul dasar-dasar ilmu politik ia menjelaskan bahwa Suatu organisasi politik yang dibentuk untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan serta memperjuangkan kepentingan masyarakat. Budiardjo menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, partai politik memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

- Sarana Komunikasi Politik, partai menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, tuntutan, maupun kepentingan publik.
- Sarana Sosialisasi Politik, partai mendidik rakyat agar memahami nilai, norma, dan proses politik dalam sistem demokrasi.
- Sarana Rekrutmen Politik, partai melakukan seleksi terhadap individu yang akan menduduki jabatan politik atau pemerintahan.
- Sarana Artikulasi dan Agregasi Kepentingan, partai mengolah berbagai kepentingan masyarakat menjadi program yang realistis untuk diperjuangkan dalam kebijakan negara.
- Sarana Pengatur Konflik, melalui mekanisme politik, partai mengelola perbedaan kepentingan secara damai dan institusional.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode historis. Metode historis merupakan salah satu penyelidikan mengaplikasi metode pemecahan yang ilmiah dari prespektif historis suatu masalah. Menurut Kuntowijoyo dalam buku "Pengantar Ilmu Sejarah" tahapan dalam pengumpulan data metode historis berupa, tahapan pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, intrepretasi (verifikasi), dan historiografi.

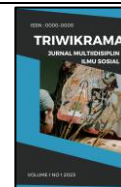
Menurut Kuntowijoyo dalam buku Pengantar Ilmu Sejarah, tahapan dalam pengumpulan data untuk metode historis meliputi beberapa langkah esensial yang harus diikuti secara sistematis.

Tahap pertama yaitu pemilihan topik. Penulis berfokus pada tema "Kabinet Burhanuddin Harahap dan Pemilu 1955: Studi tentang Transisi Kekuasaan secara Demokratis".

Tahap kedua yaitu heuristik. Proses heuristik mencakup pencarian dan pengumpulan semua materi yang relevan, seperti dokumen, arsip, kesaksian, atau literatur yang berkaitan dengan Kabinet Burhanuddin Harahap, kondisi politik 1955, dan pelaksanaan Pemilu.

Tahap ketiga yaitu kritik sumber. Setelah data terkumpul, tahap ini melibatkan pengujian keaslian dan kredibilitas sumber. Kritik sumber dibagi menjadi dua, yaitu kritik eksternal (menguji keaslian fisik sumber, seperti tanggal, penulis, dan lokasi pembuatan) dan kritik internal (menguji kredibilitas atau kebenaran isi sumber).

Tahap keempat yaitu Interpretasi. Setelah sumber-sumber dinilai, tahap interpretasi dilakukan untuk menganalisis data dan menyusun interpretasi berdasarkan bukti-bukti yang telah diverifikasi. Pada tahap ini, peneliti akan menghubungkan data yang telah dikumpulkan dengan



teori-teori sejarah yang relevan untuk menjelaskan Kabinet Burhanuddin Harahap dan Pemilu 1955.

Tahap kelima yaitu historiografi. Historiografi harus menjelaskan metode penelitian yang digunakan, sumber-sumber yang dirujuk, dan analisis data yang telah dilakukan. Penulisan harus menghindari bias dan subjektivitas, serta memberikan interpretasi yang didukung oleh bukti-bukti empiris

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Penelitian ini mengkaji peran vital Kabinet Burhanuddin Harahap dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) 1955, menganalisis tantangan yang dihadapi, dan menilai sejauh mana Pemilu 1955 mencerminkan keberhasilan transisi kekuasaan secara demokratis di Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer (1950-1959). Kabinet Burhanuddin Harahap dilantik pada 12 Agustus 1955, menggantikan Kabinet Ali Sastroamidjojo I yang mengembalikan mandat. Meskipun masa kerjanya singkat (sekitar tujuh bulan), kabinet koalisi yang didominasi Masyumi ini memegang peranan krusial dalam menyukseskan Pemilu pertama di Indonesia.

Pemilu 1955, yang sukses diselenggarakan di bawah kepemimpinan Kabinet Burhanuddin Harahap, diakui secara luas sebagai Pemilu Indonesia yang paling demokratis sepanjang sejarah bangsa. Temuan yang didapatkan bahwa pelaksanaan pemilu pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap memiliki tingkat partisipasi pemilih sangat tinggi, mencapai 91,54% dari total pemilih terdaftar, dengan 87,65% suara sah. Angka ini menunjukkan kesadaran politik yang matang dan antusiasme masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Pemilu dilaksanakan secara relatif bebas, rahasia, dan adil. Semua partai politik diwakili dalam badan penyelenggara, sebuah faktor kunci yang diyakini menjaga transparansi dan akuntabilitas proses. Keberhasilan Pemilu 1955 membuktikan bahwa Indonesia mampu melaksanakan transisi kekuasaan secara damai dan demokratis melalui mekanisme pemilihan umum, meskipun baru berusia sepuluh tahun dan masih didera berbagai masalah domestik.

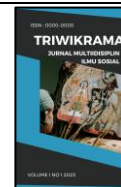
Tabel 1.1 Data Peran Burhanuddin Harahap Dalam Pemilu

Tahap Pemilu	Tanggal Pelaksana	Tujuan	Kabinet yang Berkuasa saat Pemungutan Suara
Pemilu tahap I	29 September 1955	Memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	Kabinet Burhanuddin Harahap
Pemilu tahap II	15 Desember 1955	Memilih anggota Konstituante	Kabinet Burhanuddin Harahap

PEMBAHASAN

Peran Kabinet Burhanuddin Harahap dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan Pemilu 1955 sangat menentukan. Meskipun persiapan awal (seperti landasan hukum UU No. 7 Tahun 1953) telah dirintis oleh kabinet sebelumnya, realisasi dan pelaksanaannya yang tertunda berhasil diwujudkan di bawah kepemimpinan Burhanuddin Harahap.

Kabinet ini menjadikan pelaksanaan Pemilu sebagai program utama (poin kedua program kerja) dengan target untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 29 September 1955 dan anggota Konstituante pada 15 Desember 1955. Program ini mendapat dukungan hampir



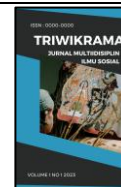
mutlak dari Parlemen, yang mencerminkan urgensi politik saat itu untuk memiliki parlemen dan badan penyusun UUD yang baru dan sah berdasarkan pilihan rakyat.

Keberhasilan Kabinet Harahap adalah mampu mengembalikan stabilitas politik dan wibawa pemerintah, termasuk menyelesaikan masalah dalam tubuh Angkatan Darat (dengan mengangkat kembali A.H. Nasution sebagai KSAD), serta gencar melakukan pemberantasan korupsi (misalnya penangkapan Djody Gondokusumo). Tindakan-tindakan ini, seperti yang diungkapkan oleh sejarawan, berfungsi menstabilkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik, yang merupakan prasyarat penting bagi penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil (Moedjanto dalam Jurnal UNESA, 1992). Stabilitas yang dicapai ini adalah kunci untuk memastikan Pemilu dapat berjalan lancar. Selain itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Darurat No. 18 Tahun 1955 guna melancarkan penyelenggaraan Pemilu (Yahya A. Muhaimin).

Menurut Crouch (1978), keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 1955 membuktikan dedikasi Indonesia terhadap proses demokrasi, namun hasil yang terfragmentasi justru memperburuk ketidakstabilan parlemen yang kemudian dimanfaatkan oleh faksi-faksi dalam Tentara untuk memajukan peran mereka. Meskipun sukses melaksanakan Pemilu, Kabinet Burhanuddin Harahap menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan yang kompleks, baik bersifat teknis, politik, maupun keamanan:

1. Beberapa daerah masih dilanda kekacauan dan pemberontakan, seperti gerakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) yang dipimpin oleh Kartosuwirjo. Meskipun demikian, Pemilu berhasil berlangsung aman, bahkan anggota angkatan bersenjata dan polisi tetap melaksanakan hak pilihnya (Kesbangpol Kapuas Hulu).
2. Kabinet Harahap merupakan koalisi dari 13 partai, yang menjadikannya rentan terhadap perselisihan antarpartai, terutama antara Masyumi dengan PNI yang kemudian menjadi oposisi. Pertikaian antarpartai dalam koalisi mendorong kabinet untuk segera mengembalikan mandat setelah Pemilu selesai.
3. Kabinet Harahap juga menghadapi masalah di luar agenda Pemilu, seperti ketidaksetujuan Presiden Soekarno terhadap beberapa kebijakan mengenai pembebasan Irian Barat, serta kegagalan mengontrol Angkatan Udara setelah masalah di Angkatan Darat berhasil diselesaikan. Ketidakmampuan menyelesaikan masalah-masalah utama dan ketidaksesuaian dengan pandangan Presiden pada akhirnya turut mempercepat kejatuhan kabinet.

Herbert Feith, seorang ahli terkemuka dalam politik Indonesia, dalam karyanya *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, menggarisbawahi Pemilu 1955 sebagai puncak periode demokrasi konstitusional. Pemilu ini membuktikan bahwa Indonesia, meskipun baru merdeka dan menghadapi berbagai kesulitan, mampu menyelenggarakan pemilihan umum yang dilaksanakan dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber dan Jurdil) di bawah landasan hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 (Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara). Hasil Pemilu menghasilkan empat partai besar—PNI, Masyumi, NU, dan PKI—yang mendominasi perolehan suara. Keberagaman dan kekuatan partai mencerminkan pluralitas politik dan kebebasan rakyat dalam menentukan wakilnya, sebuah indikator fundamental demokrasi (Kompaspedia).



4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kabinet Burhanuddin Harahap memainkan peran yang sangat menentukan dan vital dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) 1955, yang merupakan hajat politik terbesar Indonesia setelah kemerdekaan. Pelaksanaan Pemilu yang tertunda berhasil diwujudkan di bawah kepemimpinan kabinet koalisi yang didominasi Masyumi ini. Kabinet Burhanuddin Harahap secara langsung menjadikan Pemilu ini sebagai program kerjanya awalnya dimulai dari pemilihan anggota DPR dan anggota Konstituante. Kabinet ini tidak luput dari berbagai tantangan dan hambatan dalam melaksanakan Pemilu. Pemilu 1955 yang diketua in oleh Burhanuddin Harahap diakui secara luas sebagai Pemilu Indonesia yang paling demokratis sepanjang sejarah. Keberhasilan ini mencerminkan keberhasilan transisi kekuasaan secara demokratis pada masa itu.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. (2012). "The 1955 General Election: A Milestone in Indonesian Democracy.". *Journal of Historical Studies* 1, no. 2, 1-15.
- Budiardjo, M. (1988). "The 1955 General Election and the Role of Political Parties.". *Indonesian Political Science Review* 12, no. 1, 45-60.
- Crouch, H. (1978). *The Army and Politics in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Feith, H. (1962). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Lev, D. S. (1964). "The Political Role of the Indonesian Army in the Post-Independence Period.". *Journal of Southeast Asian History* 5, no. 1, 172-192.
- Nasution, A. B. (1992). *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio-Legal Study of the Indonesian Constituent Assembly 1956-1959*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Pringgodigdo, A. (1957). *Tiga Undang-Undang Dasar*. Jakarta: Pustaka Rakyat.
- Ramage, D. E. (1993). "Politics in Indonesia: From Guided Democracy to the New Order." . *Asian Survey* 33, no. 5:, 483-492.
- Ricklefs, M. (2008). *A History of Modern Indonesia since c.1200*. London: Macmillan.
- Schwarz, A. (1992). "The Decline of Democracy in Indonesia: An Institutional Perspective.". *Contemporary Southeast Asia* 14, no. 1, 30-50.